

# TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMUNALISME DI INDIA

As Martadani Noor

## ABSTRACT

*The act of Region autonomy has implemented by Indonesian government since four years ago, which is purpose to give authorities more large for doing self regulation and self determination of local government as well as local society. All those have to be done by principles of democratization, social participation, even distribution, justice, local potential, and region pluralist.*

*Following policies of region autonomy implementation in Indonesia is colored by social conflict of ethnic and religion for long time. The emergence ethnocentrism, movement of local elite and institutionalism of religion, in which all those can encourage communalism movement. In the other word that policies of region autonomy should be can a trigger communalism movement. In the context discuss of communalism movement, which is India has experience regarding to communalism movement that is influence Indians' democratization.*

*This article is to discuss how far the communalism pluralist is influential in realities of politic in India? What kind of learning realities of political in India? And what is challenging of region autonomy policy related with potential of Indonesian communalism?*

*A learning of communalism pluralist and its influential in realities of politic in India, at least there is five challenge of region autonomy policy related with potential of Indonesian communalism namely: (1) To avoid a trigger of social economic imbalance between communal, the government should be making a regulation of social economic for any communal to protect "market intervention", which can be damaging economic communal. Beside, should be there a government facilities special for any economic communal that can be solving its weakness any aspect. (2) To make a regulation for conducting "cross cultural membership" on local government, industrial, social organization (non religion) and for conducting a "multiparty system" as well as "multidimensional party system" on politic parties especially. (3) A regulation of local language that purpose limited to become as formal language and to avoid local language as instrument political vested interest of self communal, which is neglecting the Indonesian language. (4) An act social conflict - special provisions regarding to conflict of ethnic and religion -, that can be giving sanction at a level of threatening nation integrity. (5) An act of Worship Place for regulating its building.*

**Key words: Policy; Region Autonomy; Communalism.**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan keniscayaan untuk memulai demokratisasi di Indonesia yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal dapat menikmati desentralisasi dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat dan pada gilirannya menuju kemandirian (*self determination*) ataupun pembagian keseimbangan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan (*sharing of power for governmental*). Otonomi daerah diharapkan menciptakan keseimbangan proses dan interaksi politik untuk mendorong masyarakat lokal yang demokratis (*local democratization*) melalui pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan tata pemerintahan yang baik (Utomo, 1999; Usman, 1999). Semua itu dalam rangka:

“...menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, (sehingga) dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, ...sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, ...” (UU no. 22 / 1999 tentang Pemerintah Daerah).

Bersamaan dengan tumbuhnya semangat otonomi daerah tersebut, terdapat beberapa peristiwa masyarakat lokal yang telah dan sedang berlangsung yang menunjukkan interpretasi otonomi daerah yang lebih luas daripada makna normatifnya. Misalnya, memorandum Timor Timur yang menghasilkan kesempatan konsolidasi kekuatan internasional dengan kekuatan lokalisme untuk melepaskan wilayah tersebut dari bagian wilayah integrasi Indonesia; Tuntutan dan gerakan "kemerdekaan" kelompok masyarakat Aceh, Irian Jaya (Papua), Riau maupun Dayak Kalimantan Tengah merupakan bentuk konsolidasi lain, untuk merebut kembali hak-hak ulayat dan atau primodial, relokasi kewenangan dalam pemerintahan (politik) maupun kemandirian pengelolaan dan penguasaan hasil sumber daya alam (ekonomi) dari tangan otoritas segelintir elit nasional dan atau dari (elit) komunitas lainnya (Klinken, 2001). Demikian juga konflik sosial di Maluku menyusul di Ambon yang (salah satu penyebabnya) yaitu perubahan interpretasi dengan perspektif *ethnicity* dan agama, antar elit lokal terhadap kepemimpinan birokrasi pemerintahan daerah yang dibangun pada masa orde otoritarianisme "Soeharto" (Kusuma SP, 2000).

Realitas sosial di atas, menyusul interpretasi lokal terhadap era reformasi dan otonomi daerah, merefleksikan orientasi kelompok

etnosentrisme, hingga bangkitnya lokalisme oleh elit lokal. Dengan kata lain, masyarakat lokal telah mengarah pada penguatan komunalisme etnis dan lokal melalui elit lokal yang berkonsolidasi dengan etnosentrisme; serta *religion institutionalism* pada kalangan masyarakat sipil (Martadani, 2001).

Realitas yang anti keberagaman demikian jauh dari orientasi demokratisasi yang sangat mengandalkan kooperatif, akomodatif, toleransi, dialogis dan penegakan supremasi hukum maupun penghargaan hak-hak kemanusiaan dalam rangka menumbuhkan kultur dan struktur masyarakat yang adil dan egaliter.

Realitas sosial di atas menyadarkan kita bahwa, saat ini sedang menggeliat tiga konsolidasi pada kalangan masyarakat sipil yaitu, *pertama* potensi komunalisme etnis lokal; *kedua*, potensi etnosentrisme dan *relegion institutionalism*; *ketiga*, potensi kebangkitan elit lokal (baru). Fenomena demikian juga memberikan gambaran bahwa kebijakan otonomi daerah akan membuka peluang dengan gerakan keberagaman kultural, khususnya komunalisme.

Keberagaman komunalisme di India tampaknya dapat memberikan pelajaran yang baik bagi kita. Keberadaan komunalisme di India, baik yang berbasis agama, kasta, bahasa, sosial-ekonomi maupun tradisi-tradisi, telah banyak terkait secara politis yang mengiringi perjalanan demokratisasi India

(Grover, 1989). Kiranya, basis potensi komunalisme di India secara sosiologis memiliki kemiripan dengan yang ada di Indonesia.

Permasalahan yang bisa untuk didiskusikan lebih jauh adalah sejauhmana keberagaman komunalisme berpengaruh dalam realitas politik di India?. Apakah pelajaran yang dapat kita simak dari realitas politik di India berkaitan dengan keberagaman komunisme?. Apakah tantangan kebijakan otonomi daerah sehubungan potensi komunalisme di Indonesia?

## INDIA DAN KEBERAGAMAN KOMUNALISME

Dunia mengakui bahwa India merupakan sebuah negara demokrasi terbesar. Hal itu tidak hanya ditandai dengan besarnya partisipasi pemilih dalam pemilu, jaminan kebebasan berbicara, melainkan juga adanya sistem politik yang memungkinkan kebebasan masyarakat berorganisasi serta sangat mengakomodasi terhadap otonomi daerah. Di India, demokrasi menjadi bagian komitmen nasional yang telah dipromosikan oleh *founding fathers* seperti Mahatma Gandhi dan Jawahar Lal Nehru. Meskipun demikian, masyarakat India selalu berhadapan dengan tantangan keberagaman komunalisme yang turut menyeter perkembangan demokrasi. Masyarakat India cenderung bersatu tetapi ketika komunalisme muncul masyarakat menjadi terbelah. Komunalisme rupanya musuh yang

amat berbahaya dan setiap orang dapat saling menyerang atas kecintaannya pada komunalisme. Mehta menulis bahwa :

*"Nationalism and communalism have been the most important factors of the root of major crises in twentieth century Indian politic. Nationalism has been the aspiration and communalism the disease and both in there own ways have shaped Indian Politics."* (Mehta, 1983: 153.)

Komunalisme dapat dipahami dalam beberapa konteks, baik secara politis, ekonomis maupun kultural. Fenomena komunalisme di India seringkali berhadapan dengan satu sama lain dalam komunitas keagamaan (*religious communities*). Komunalisme sebagai sebuah ideologi yang menekankan pada perbedaan identitas kelompok keagamaan dan atau kasta maupun daerah dengan kelompok atau daerah lainnya dan seringkali memiliki tendensi mempromosikan kelompok kepentingan masing-masing (Fadia, 1996: 617). Menurut Melson dan Wolpe, *"Communalism is the political assertiveness of a community to maintain its identity in a plural society undergoing modernization"* (*The American Political Science Review*, 1988).

Sumbangan pemikiran dari Chandra (1997) bahwa, konsepsi komunalisme berbasis kepercayaan pada perbedaan agama-agama dan ciri-ciri kelompok sebagai perbedaan yang fundamental antar satu agama dengan agama lainnya.. Sejak kaum Hindu, Muslim dan Sikh sebagai

kelompok agama yang memiliki perbedaan tersendiri dalam kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan politik, maka tidak pernah terjadi titik temu politik. Dengan begitu, kerugian bagi suatu kelompok dapat berarti keuntungan bagi kelompok agama yang lain dan begitu sebaliknya

Komunalisme mengeksploitasi kekuatan, baik antar agama, kasta maupun politik yang sekuler dan pada gilirannya melahirkan dunia imajinasi ketakutan antar komunitas. Komunal rupa-rupanya menyatu dengan agama dan masuk dalam wilayah permusuhan politik. Oleh karena itu, komunal pada dasarnya sebuah ideologi yang merupakan percampuran politik dengan komunitas agama dan atau kasta, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan wilayah masyarakat politik. Itulah sebabnya bisa dipahami jika, suatu strategi yang tidak tepat mengenai pembagian wilayah politik sebuah komunal dapat berlawanan dengan pemahaman nasionalisme yang menyatukan multi-etnik, multi-agama, dan multi-bahasa komunitas.

## GAMBARAN KERUSUHAN KOMUNAL

Saksena dalam artikel, *"Anatomy of Communal Riots"*, yang di muat dalam *The Indian Express*, 31 March 1990 menggambarkan bahwa, selama 10 tahun, dari tahun 1954 sampai dengan, 1963, ketika posisi partai Kongres (*Congress Party*) hampir selalu tidak bisa dikalahkan, paling sedikit terjadi 62

kerusuhan komunal setiap tahun. Dan dalam kerusuhan itu, orang yang terbunuh berkisar 40 jiwa / tahun. Pada saat tahun 1964 hingga 1970 merupakan saat yang buruk. India menuai kerusuhan komunal rata-rata 425 kali setiap tahun dan 467 terbunuh setiap tahun. Tahun 1971 sampai 1978 masa yang agak tenang, di mana mengalami penurunan kerusuhan yaitu 234 kali dan 68 orang meninggal setiap tahun periode itu. Dalam tahun 1988 dari 611 kali kerusuhan komunal, 50 % terjadi pada wilayah pedesaan. Selama tahun itu juga, sedikitnya ada 80 kali peristiwa yang hampir menyulut kerusuhan.

Menurut Saksena(1990), perbedaan yang signifikan antara kerusuhan pada awal tahun enam-puluhan dengan tahun delapan-puluhan yaitu pada tahun 80-an para perusuh amat mudah mendapatkan senjata api, baik legal maupun ilegal dan telah menjadi industri besar. Industriawan senjata api adalah orang-orang memiliki lobby dan "suara" kuat pada hampir semua partai politik di India.

Saksena menyimpulkan bahwa, pengulangan-pengulangan kerusuhan pada wilayah-wilayah yang sama, disebabkan oleh dua alasan. *Pertama*, tidak efektifnya penanganan kerusuhan karena, adanya gerakan kerusuhan diikuti oleh pembakaran, perampasan, dan penyerangan yang menyebar; *Kedua*, tidak ada investigasi penyelesaian yang menyeluruh. Lebih dari 50 % kasus kerusuhan dan

kekerasan komunal yang serius tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Penyelesaian lebih banyak bernuansa retorika oleh pemerintah. Banyak penguasa regional yang lebih banyak menunggu "petunjuk" pusat, walaupun memiliki kekuatan keamanan yang mampu memberantas kerusuhan.

### **KOMUNALISME; PERSPEKTIF SOSIO- EKONOMI**

Engineer (1975) menganalisa bahwa, terbentuknya komunalisme merupakan fenomena yang berkaitan dengan sosio-ekonomi sebuah kelompok. Menurut Engineer, misalnya permusuhan antara sekte kelompok Shivaji dan Aurangzeb, yang amat terkenal itu, bukanlah karena faktor alami agama, tetapi perlawanan politik yang mencerminkan krisis sistem ekonomi feodalis pada masa lalu. Kasus lain, dalam konteks kelompok Muslim India misalnya, gagal melakukan produksi kelas kapitalis Muslim.

Kelas menengah Muslim sebelumnya telah didominasi oleh kaum feodal, hingga berlanjut pada banyaknya kehilangan tanah pada saat awal kemerdekaan India. Sementara itu kelas kapitalis Hindu, selalu dapat bertahan. Dus, tidak ada kompetisi yang disepakati bersama. Padahal, perkembangan ekonomi, hanya sedikit yang di raih oleh kelas atas Muslim yang di kota.

Komunalisme India modern

merupakan cerminan atau produk konflik antara sesama kelompok kelas atas di perkotaan. Sekedar mengambil contoh, kerusuhan di daerah Godhra dari tahun 1980-1981, merupakan ujung dari konflik antara kelompok Sindhi dan Ganchi sebagai kaum pedagang dengan elit politisi. Kerusuhan di Moradabad pada Agustus 1980 merupakan contoh lain dari konflik antar kelas atas yang memiliki basis komunal. Asghar menulis :

*"The socio-economic basis of communalism, thus, can be very well understood from the analysis given. The ruling class in the developing and crisis-ridden economy would always try to promote and communal conflicts to confuse and cross with class conflict."*  
(Engineer, 1989: 335-345).

## TIPIKAL KOMUNALISME

### 1. Hindu

Kelompok Hindu dari komunal Mahasabha didirikan sebagai reaksi dari keberadaan kelompok atau Liga Muslim yang dilindungi oleh Partai Kongres dengan memasukan seluruh anggota Liga Muslim sebagai anggota partainya. Perjanjian Luknow pada tahun 1916 dan pengaruh kaum moderat pada Partai Kongres ternyata mengasingkan banyak kaum Hindu beraliran keras yang minta otonomi daerah. Meskipun demikian, kelompok Mahasabha di bawah pimpinan VD. Savakar yang berada di partai Kongres menyatakan bahwa "*Hinduize all politics and militarize Hinduism*". Perpecahan kaum

Mahasabha diatasi dengan unifikasi, integrasi dan konsolidasi oleh gerakan Hindu Rashtra yaitu Bangsa Hindu.

Kemudian Rama Rajya Parishad (RRP) didirikan pada tahun 1948. Kelompok ini sangat ortodok dalam partai Komunalisme Hindu. Mereka sangat mendukung konservatif pemilikan kekayaan dan mereka hampir seluruhnya tergabung dalam salah satu perusahaan terbesar di India yaitu, group perusahaan Rajasthan.

Partai Bathriya Janata merupakan penjelmaan dari Jana Sangh, sebuah kelompok Hindu militan nasionalis yang didirikan oleh Shyama Prasad Mookherjee. Mookherjee dan bersama kelompok advokasi pembangunan modernisasi India memiliki landasan konsep Hindu Rashtra yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan kekayaan tradisi-tradisi India dan tidak menghendaki daerah otonom untuk sekelompok etnis maupun agama (*The Indian Express*, 1992).

Organisasi yang sangat aktif dan artikulatif dalam memperjuangkan kepentingan politik kaum Hindu adalah kelompok Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), didirikan pada tahun 1925, banyak berperan penting dan bersikap tegas sebagai Hindu nasionalis yang militan. (Engineer, 1975). Belakangan RSS bergabung dengan BJP dengan komitmen untuk memporong kepentingan kelompok Hindu di India dan RSS berperan penting dalam

memenangkan BJP sebagai partai yang memerintah di India saat ini.

## 2. Muslim

Keterbelakangan sosial ekonomi bagi kaum Muslim India, jelas mengalami kesulitan dalam mengikuti modernisasi, baik dalam pemerintahan, bisnis maupun kesempatan pendidikan. Dan faktor demikian yang cenderung mendorong gerakan Muslim bersikap separatist regional. Nampaknya kaum Muslim merasakan tidak ada organisasi yang memperjuangkan kepentingan minoritas Muslim. Itulah yang cukup mempengaruhi untuk meraih posisi-posisi pemerintahan dalam rangka mendorong perlindungan kepentingan minoritas dengan menguasai daerah atau teritorial otonomi. Model inilah yang terjadi pada beberapa negara bagian di India, misalnya Uthar Pradesh, Aligarh, maupun Kasmir dan Pakistan serta Bangladesh yang telah memisah diri sebagian sebuah negara.

Organisasi Jamaat-Islami, Jamaiyt-ul-Ulema, Dini Talimi, Majlis-Mushawat, Itihad-al-Musalmeen, Ajnuman-Taraqee-Urdu adalah organisasi Muslim lain yang bersama-sama membangun kepentingan ideologi komunalnya. Meskipun, kelompok Muslim India itu menyadari bahwa tidak mungkin mereka akan berperan utama. Apa yang bisa mereka lakukan adalah menumbuhkan kesatuan dalam rangka memperjuangkan pemeliharaan

tradisi-tradisinya yang berkaitan dengan sosial ekonomi. (Shah, 1969).

Jamaat-e-Islami dan Jamaat-ul-Ulema mengklaim sebuah organisasi kultural dengan keanggotaan yang terbuka, sebagai perwakilan muslim ortodox dan mereka menghendaki diberikan perlindungan bagi seluruh komunitas Muslim dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Misalnya, perlindungan hukum muslim, kewajiban menjalankan syariat Islam untuk anak-anak muslim, sensor media publikasi khususnya untuk buku-buku sekolah yang mengancam keyakinan siswa pada agama Islam dan pelarangan minum-minuman keras (Shah, 1969).

Kebanyakan organisasi politik muslim India tergabung dalam Liga Muslim (*Muslim League*) dan belakangan menjadi satu partai yang berhasil di wilayah India Selatan, misalnya di Kerala juga kurang lebih di Tamilnadu yang kemudian beraliansi politik untuk dalam suatu koalisi pemerintahan.

Liga Muslim telah mencoba mencari perlindungan komunitas, terutama yang berkaitan dengan isu-isu di luar agama misal, pemeliharaan bahasa Urdu, pengembangan ekonomi muslim dan quota proporsional berdasarkan jumlah penduduk pada lembaga pendidikan, pegawai pemerintahan dan anggota perlemen daerah maupun pusat. (Fyze, 1976).

### 3. Sikh

Pemisahan wilayah otonom Punjab telah membawa perubahan yang drastis dalam kehidupan beragama, sejak kejatuhan kerajaan Sikh. Pembagian Punjab sebagai garis komunal tersendiri yang membawa dampak sangat luas dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, kultural/bahasa serta administratif pemerintahan maupun moralitas yang semuanya mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat.

Masyarakat beragama Hindu merupakan penduduk yang pada awalnya minoritas (30%) di Punjab, kini menjadi mayoritas (70%) pada negara bagian Punjab. Sedangkan, masyarakat Sikh merupakan kelompok minoritas kedua dari seluruh penduduk dan berada di Punjab bagian Timur. Muslim tadinya sebagai mayoritas untuk seluruh negara bagian Punjab, kini menjadi kelompok yang sangat kecil. (Fadia, 1984).

Para pimpinan komunal Hindu dan Sikh, seringkali mengadakan kerjasama menghadapi tantangan keberadaan kekuatan komunal Muslim, selama sebelum saat pembagian wilayah dan kini, keberadaannya secara keseluruhan memiliki peranan yang berbeda.

Pada saat Sensus 1951 komunal Hindu menyatakan bahwa bahasa Hindi sebagai bahasa ibu yang mengingkari bahasa Punjabi yang pada mulanya dapat berjalan dengan damai tanpa protes. Pada tahun 1959,

pemakaian bahasa Hindi menuai protes dari komunal Punjab, sehingga pemerintahan Punjab pada bulan Oktober 1959 mengumumkan usulan yang dikenal "Rumusan Sachar". Meskipun usulan itu hanya sekedar memuaskan pimpinan komunal Punjab, Mr. Tara Singh. Pimpinan ini berpandangan bahwa pengingkaran bahasa Punjabi merupakan diskriminasi bagi komunal Sikh sehingga muncul slogan mereka :

*"We have a culture different from the Hindus. Our culture is Gurumukhi culture and our literature is also in the Gurumukhi script. We want to have a province where can safeguard our culture and our tradition"* (Wallace and Chopra, 1981).

Sejak saat itu, komunal Sikh sebagai gerakan politik bernaung di bawah organisasi Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) yang didirikan oleh kurang lebih 160 anggota. SGPC juga berfungsi sebagai institusi tertinggi bagi komunal Sikh. Disamping itu juga berfungsi untuk mengawasi para politisi dari perwakilan komunal Sikh. (Surindre S. and Narindra, 1979; Shourie, 1982; ) pada pemilu tahun 1979, SGPC mengadakan pemogokan massal dengan isu serentak dan tuntutan otonomi yang lebih luas sebagai sebuah negara. Isu inilah yang menempati tema-tema paling dominan di dalam pemilu untuk kepentingan perjuangan agama.



## TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Komunalisme di India merupakan permasalahan besar hingga saat ini. Implikasi komunalisme bukan saja meluluhlantahkan kemajuan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melainkan juga sebagai ancaman serius terhadap demokratisasi. Komunalisme bagi India, sungguh musuh progresif bagi kemajuan perubahan sosial, pengembangan negara federal yang rasional, bersahabat dan humanistik. (Doctor, 1967)

Ada beberapa garis realitas yang bisa di tarik mengenai komunalisme di India tersebut, yang bisa dipakai sebagai pelajaran yaitu : 1) Elemen primodialistik kultural seperti: *ethnicity*, agama, kasta, bahasa, maupun tradisi merupakan identitas kultural sebuah komunal yang harus di lihat sebagai keniscayaan sosial yang tumbuh dan berkembang dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 2) Perlakuan diskriminatif sosial-politik, kesenjangan sosial-ekonomi apalagi penghancuran (sistematis maupun tidak) terhadap sebuah komunal merupakan awal kebangkitan komunalisme yang dapat berbasis dari satu atau lebih elemen primodialistik kultural. 3) Penumbuhan nasionalisme kebangsaan secara maniak dengan mengabaikan bahkan mempertentangkan dengan elemen primodialistik kultural merupakan embrio dan penyuburan

berkembangnya komunalisme. 4) Setiap komunal atas dasar primodialistik kultural memiliki pola-pola hubungan sosial, kepemimpinan dan pandangan hidup masing-masing yang berakar dan sistemik, betapapun sederhananya. Oleh karena itu, komunal senantiasa memiliki elit dan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang dapat mendorong lahirnya komunalisme. 5) Komunalisme tampaknya selalu mendorong adanya proteksi dan atau jaminan-jaminan sosial politik dan sosial ekonomi, terutama yang bersumber dari negara. Meskipun, munculnya proteksi dan jaminan negara pada suatu komunalisme, maka akan dapat berarti kerugian dan atau ancaman bagi komunalisme lainnya. 6) Konflik komunalisme mendorong berurat-akarnya permusuhan dan kekerasan yang sulit dapat diatasi dalam waktu singkat. Dan para elit komunal dapat berperan mengingkari penyelesaian secara hukum apabila terjadi kerusuhan atau konflik, bahkan dapat bersedia sebagai pensuplai dana dan instrumen perusahaan. 7) Komunalisme dapat menguatkan tuntutan pembagian wilayah politik khusus / isitimewa yang semakin mereproduksi pertentangan antar komunal.

Dari tujuh pelajaran garis realitas di atas maka terdapat beberapa tantangan implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia yaitu :

1. Komunal primodialistik-kultural di Indonesia merupakan keniscayaan sebuah masyarakat majemuk,

khususnya etnik, agama dan adat/istiadat serta bahasa yang dapat merupakan basis potensi terbentuknya komunalisme. Dan sebagaimana pelajaran dari India bahwa perlakuan kesenjangan sosial ekonomi merupakan pemicu komunalisme. Oleh karena itu dalam hal ini di pandang perlu adanya kebijakan simultan oleh negara/pemerintah, yaitu : (a) Proteksi perekonomian komunal terhadap intervensi pasar yang mengancam kehancuran ekonomi komunal. (b) Penyediaan fasilitas dan regulasi perekonomian khusus agar perekonomian komunal dapat berkembang mengikuti perekonomian pasar. Kebijakan simultan ini diharapkan antar komunal memperoleh tingkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

2. Dalam setiap wilayah pemerintahan sudah saatnya menciptakan regulasi formulasi keseimbangan antar kemajemukan etnis dan agama terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini untuk menghindari pengingkaran kemajemukan antar etnis dan agama pada wilayah administratif. Regulasi formulasi demikian yang pada prinsipnya menganut "*cross cultural membership*", barangkali dapat juga mengikat pada organisasi sosial (non Agama), industri besar dan lebih penting lagi pada organisasi partai politik. Khusus parpol, kita telah menganut "*multyparty system*" (sistem partai beragama) ang

seharusnya diikuti oleh kewajiban "*multidimensional party system*" (sistem keberagaman anggota lintas kultural) (Tim Fisipol UGM, 1994)

3. Perlu digagas adanya regulasi batasan penggunaan bahasa daerah untuk dijadikan bahasa resmi/formal. Tanpa adanya regulasi penggunaan bahasa daerah, maka bahasa daerah dapat berkembang menjadi alat politik untuk mengingkari kemajemukan penggunaan bahasa bahkan mengingkari bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

4. Sebagaimana kajian di atas, bahwa konflik antar etnis dan agama akan memiliki kedalaman konflik yang berkepanjangan, menyebar dan melahirkan musuh tidak teridentifikasi (*unidentified enemy*). Oleh karenanya, di pandang perlu adanya perundang-undangan peradilan khusus/hukuman yang bisa dijadikan landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi ancaman terhadap integritas negara apabila seseorang / sekelompok orang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik etnis dan agama. Konflik antar etnis dan agama tidak cukup hanya di pandang sebagai kasus kriminalitas.

5. Tempat ibadah setiap agama, juga bermakna sebagai simbol identitas agama komunal yang berada pada lingkungan para pengikutnya. Simbol ini amat sensitif dalam interaksi antar komunal yang kerap kali menjadi pemicu konflik. Pengalaman India, sampai

mengeluarkan peraturan setingkat undang-undang mengenai perlindungan tempat ibadah pada tahun 1991 (*The Place of Worship - Special Provisions- Act*). Kiranya, apa yang kita mengenai pengaturan pendirian tempat ibadah ini tidak cukup lagi hanya dengan peraturan setingkat menteri, tetapi sudah saatnya digagas setingkat undang-undang.

edited by Henk Schulte Nordholt and Irwan Abdullah. Pustaka Pelajar, hlm. 67-106.

## DAFTAR PUSTAKA

*The American Political Science Review*, Vol. 64, 1988

Chandra, Bipan, 1997. *Communalism in modern India*.

Doctor, A.H., 1967. "Interest groups in India," *Quest Bombay*, ( 53), April-June.

Engineer, Asghar Ali 1975. "Distorting Indian history", *The Times of India*, Bombay, 11 March.

----- 1989. "Socio-economic basis of communalism" in Virendra Grover (ed.), *Political System in India*, 7.

Fadia, Babu Lal. 1984. *State politics in India*, 2, New Delhi.

Fyzee, A.A.A. 1967. "The muslim minority in India," *Quest Bombay*, October-December.

Grover, Virendra (Ed)., 1989. *Political System in India*, 7.

Klinken, Gerry Van, 2002. "Indoensia's new ethnic elites", in *Indonesia: in search of transitions*,

Kumar, Pramod. 1988. "Communal ideology: the instruments, basis and social appeal," in *The American Political Science Review*, 64.

Kusuma SP. 2000. "Konflik di Ambon : penafsiran sosiologis atas pengamatan konflik", *JSP : Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM*, 3(3) Maret.

Mehta, V.R. 1983. *Ideology, modernization and politics in India*. New Delhi.

Noor, As Martadani. 2001. "Civic education & masyarakat tanpa pertikaian", *Bulletin Populika*, 1.

Saksena, N. S. 1990. "Anatomy of communal riots," *The Indian Express*, 31 March.

Shah, A.B. 1969. "Muslim thought in India," *Humanist Review*, Bombay, October-December.

Shourie, Arun. 1982. "The politics of pandering," *The India Express*, India, 12 May.

Suri, Surindre S. and Narindra Dogra, 1992. "The Study of the SGPC Elections, 1979", *The Indian Express*, 16 August.

Universitas Gadjah Mada. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 1994. *Sistem sosial Indonesia: Bahan kuliah*. Yogyakarta.

Usman, Sunyoto. 1999. "Pemberdayaan lembaga politik

dan otonomi daerah”, *Bulletin Ganesha STPMD “APMD”*, 1(1).

Wallace, Paul and Surendra Chopra, (eds.), 1981. *Political dynamics of Punjab*. Amritsar. 81.

Utomo, Warsito. 1999. “Kajian kritis otonomi daerah yang mengarah kepada pemberdayaan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan SDM”, *Bulletin Ganesha STPMD “APMD”*, 1(1).